PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DAN SURAT TAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang terdaftar di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat I Periode 2011-2015)

EFFECT OF SELF ASSESSMENT SYSTEM AND LETTER OF TAX BILLS ON VALUE ADDED TAX REVENUE (Case Study On Tax Office listed in the Regional Office of Directorate General of Taxation West Java I period 2011-2015)

Oleh :

Hidayatulloh
21112046

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia

ABSTRACT

The increase in tax revenues in Indonesia related to the implementation of Self Assessment System. Implementation of Self Assessment System causing tax arrears. To overcome these problems, implemented tax collection is a series of actions in order to settle tax debts insurer taxes and fees tax collection by the tax authorities in order to increase tax revenues.

The purpose of this study is to analyze and assess the influence of the Self Assessment System and Letter Of Tax Bills on Value Added Tax on Tax Office Pratama Soreang. The analytical method used in the processing of the data in this study is deskirptif analysis and multiple regression analysis as a tool in making conclusions.

Data collection methods used were interviews and documentation. Based on the results of analysis show that the Self Assessment System, and Letter Of Tax Bills Acceptance effect on Value Add Tax.

Keywords: intensification of tax, the amount of the taxpayer's tax revenues

I. PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang Penelitian

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak adalah iuran wajib yang diberlakukan pada setiap Wajib Pajak atas obyek pajak yang dimilikinya dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah (Tresno, 2012).

Berdasarkan Nota Keuangan & RAPBN 2015, Rapat Badan Anggaran DPR Pendapatan Perpajakan Negara mengalami peningkatan dari tahun 2014 ke tahun 2015. Berikut data pendapatan perpajakan tahun 2014-2015

Tabel 1.1
Pendapatan Perpajakan Negara Tahun 2014-2015

Uraian	2014	2015		
	APBNP	APBN	RAPBNP	% thd APBN
1	2	3	4	5=4/3
1. Pendapatan Pajak Dalam Negeri	**1.189.826,6**	**1.328.487,8**	**1.437.382,7**	**108,2**
a. Pendapatan Pajak Penghasilan	569.866,7	644.396,1	680.754,2	105,6
1) Pendapatan PPh Minyak dan Gas Bumi	83.889,8	88.708,6	50.918,9	57,4
2) Pendapatan PPh Non-Minyak dan Gas Bumi	485.976,9	555.687,5	629.835,3	113,3
b. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	475.587,2	524.972,2	576.469,2	109,8
c. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	21.742,9	26.684,1	26.689,9	100,0
d. Pendapatan Cukai	117.450,2	126.746,3	141.739,9	111,8
e. Pendapatan Pajak lainnya	5.179,6	5.689,1	11.729,5	206,2
2. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	**56.280,4**	**51.503,8**	**47.206,6**	**91,7**
a. Pendapatan Bea Masuk	35.676,0	37.203,9	35.153,6	94,5
b. Pendapatan Bea Keluar	20.604,4	14.299,9	12.053,0	84,3
J U M L A H	**1.246.107,0**	**1.379.991,6**	**1.484.589,3**	**107,6**

Sumber: Nota Keuangan & RAPBN 2015, Rapat Badan Anggaran DPR

Dalam upaya menunjang berlangsungnya kebijakan fiskal yang mandiri dan berkelanjutan, penerimaan perpajakan merupakan andalan di dalam pengeluaran pemerintah untuk pemulihan kondisi ekonomi (Saepudin, 2008).

Di Indonesia ini banyak sekali perusahaan yang berdiri dan sebagian besar bergerak di bidang industri. Bidang industri ini merupakan salah satu pendapatan Negara terbesar di bidang pajak, khususnya Pajak Pertambahan Nilai. Berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pajak nomor Kep – 417/ PJ / 2001, badan usaha yang bergerak di bidang industri itu sendiri termasuk salah satu yang menyumbang cukup banyak dalam penerimaan kas Negara. Mengingat cukup banyaknya perusahaan yang bergerak dibidang industri, dagang dan jasa baik yang berskala besar maupun kecil, sehingga dalam pelaksanaannya penagihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) industri, dagang dan jasa di dalam negeri ini tidak terlepas dari ketentuan – ketentuan dan tata cara yang berlaku di Indonesia.

Pada tahun 2015 jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT Masa PPN di KPP Pratama Soreang terbilang cukup banyak jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, namun Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai ditahun 2015 tidak mencapai dari target yang telah ditetapkan oleh KPP Pratama Soreang. (KPP Pratama Soreang).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang menyumbang pendapatan terbesar dari sistem perpajakan di lebih dari 136 negara, meningkatkan sekitar seperempat dari penerimaan pajak di dunia (Aizenman & Jinjarak, 2005). Di Indonesia dalam era 1989 hingga tahun 2004 penerimaan Pajak Pertambahan Nilai terus mengalami kenaikan (Yusuf, 2011). Peningkatan penerimaan pajak pemerintah ini terkait dengan adanya reformasi perpajakan (tax reform) yang dimulai pada tahun 1984, dengan dikeluarkannya beberapa undang-undang baru, diantaranya adalah Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah. Kemudian disusul oleh perubahan perpajakan kedua pada tahun 1994, dan perubahan ketiga pada tahun 2000 (Wibowo, 2000). Perubahan yang mendasar atas Undang-undang tersebut adalah sistem pemungutan pajaknya, dari sistem *Official Assessment* yaitu memberikan wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang menjadi sistem *Self Assessment* yaitu memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Yusuf, 2011).

Semua wajib pajak diharapkan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi karena di Indonesia menggunakan *self assessment system*, masih banyak terjadinya ketidaksesuaian dan penyimpangan dalam prakteknya, apakah hal tersebut di sengaja ataupun tidak disengaja oleh wajib pajak. Penerapan *self assessment system* yang menuntut keikutsertaan aktif WP dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan WP yang tinggi. Jika semua WP memiliki kepatuhan yang tinggi, maka penerimaan pajak akan optimal dan efeknya pada penerimaan negara juga akan semakin besar. Namun, dalam kenyataannya belum semua potensi pajak yang ada dapat digali. Sebab masih banyak Wajib Pajak yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi negara maupun bagi mereka sendiri sebagai warga negara yang baik (Fika, 2008).

Self Assessment System pada umumnya dapat di terapkan pada jenis pajak dimana wajib pajak di anggap cukup mampu untuk menghitung dan menetapkan pajak terutangnya sendiri. Dalam hal ini dikenal sebagai 5 M, yakni mendaftarkan diri di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), menghitung dan memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang, menyetor pajak tersebut ke Bank Presepsi atau Kantor Giro Pos dan melaporkan penyetoran tersebut kepada Direktur Jendral Pajak, serta terutama menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dengan baik dan benar.

Penerimaan pajak dapat ditingkatkan melalui surat tagihan pajak. Mardiasmo (2009:37) mengatakan bahwa surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administratif berupa bunga atau denda, surat tagihan pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak, sehingga dalam penagihannya dapat dilakukan dengan surat paksa, apabila pajak yang terutang berdasarkan dasar penagihan pajak tidak dibayar oleh wajib pajak dapat ditagih dengan surat paksa.

Menurut Ilyas dan Burton (2008: 47) surat tagihan pajak (STP) terdiri dari surat ketetapan pajak (SKP), surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT), surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB) dan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT). Lebih lanjut dikatakan bahwa surat tagihan pajak merupakan surat pertama yang dikeluarkan jika wajib pajak tidak atau kurang bayar pajak akibat salah tulis atau salah hitung, harus membayar denda sebesar 2%, belum menjadi pengusaha kena pajak tetapi telah memungut pajak, atau telah dikukuhkan, membayar dan melaporkan tetapi tidak benar.

Jumlah Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan oleh KPP Pratama Soreang pada tahun 2015 terbilang banyak jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, namun Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai ditahun yang sama tidak mencapai dari target yang telah ditetapkan oleh KPP Pratama Soreang. (KPP Pratama Soreang).

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul "Pengaruh *Self Assessment System* Dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian adalah :

1) Seberapa besar pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
2) Seberapa besar pengaruh Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

1.1 Tujuan Peneitian

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah dirumuskan, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah :

1) Untuk menganalisis dan mengkaji besar pengaruh *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
2) Untuk menganalisis dan mengkaji besar pengaruh Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

1.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan bagi berbagai pihak, diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pemecahan masalah-masalah di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang tentang pengaruh *Self Assessment System* dan Surat Tagihan Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

2) Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini sebagai pembuktian kembali teori perpajakan yang diperoleh di perkuliahan dengan praktik yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pramata Soreang khususnya untuk mengetahui pengaruh *Self Assessment System* dan Surat Tagihan Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 *Self Assessment System*

2.1.1.1 Pengertian *Self Assessment System*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:101) Definisi *Self Assessment System* adalah sebagai berikut: “Suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya”.

2.1.1.2 Indikator *Self Assessment System*

Indikator dari *Self Assessmen System* dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran Siti Kurnia Rahayu (2010:101), adalah Jumlah Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) PPN.

2.1.2 Surat Tagihan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Surat Tagihan Pajak

Pengertian Surat Tagihan Pajak Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:186), menyatakan bahwa: “Surat Tagihan Pajak adalah untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda”.

2.1.2.2 Indikator Surat Tagihan Pajak

Indikator dari Surat Tagihan Pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran (Titin Vegirawati 2011), adalah Data Jumlah Penerbitan Surat Tagihan Pajak.

2.1.3 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:235) definisi Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut: “Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi umum dalam negeri berupa Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak.”

2.1.3.2 Indikator Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Indikator dari Pajak Pertambahan Nilai dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran (Ida Ayu Tivon Trisnayanti, 2012) dan (Ika Nursanti, 2013), adalah Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.2 Kerangka Pemikiran

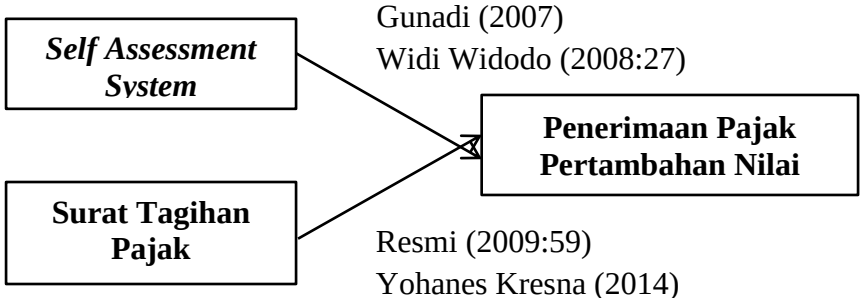
2.2.1 Pengaruh *Self Asssessment System* Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Widi Widodo (2008:27), bahwa *Self Assessment System* berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dijelaskan sebagai berikut: “Jumlah kewajiban pajak langsung atas Wajib Pajak adalah dengan ditetapkan dalam keputusan yang diberikan oleh Administrasi Pajak sesuai tempat tinggal Wajib Pajak. Pengaruhnya Wajib Pajak harus melaporkan SPT kepada Administrasi Pajak setelah akhir periode Pajak, sesuai dengan tahun

kalender. *Self Assessment* berlaku dalam sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kewajiban PPN ditentukan untuk periode akuntansi tertentu yang disajikan dan menyatakannya dalam pelaporan pajak mereka."

2.2.2 Pengaruh Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut (Resmi, 2009:59) bahwa Surat Tagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dijelaskan sebagai berikut: "Surat Tagihan Pajak adalah surat yang diterbitkan untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Surat tagihan pajak dikeluarkan apabila hasil analisis fiskus, wajib pajak tidak atau kurang bayar, harus membayar denda, atau berkaitan dengan kewajiban sebagai PKP dalam hubungannya dengan pembayaran PPN."



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2011:64).

Berdasarkan tujuan penelitian yang dideduksi melalui proposisi yang ada dalam paradigma penelitian, maka dideduksi hipotesis sebagai berikut:

H_1: *Self Assessment System* berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

H_2: Surat Tagihan Pajak berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode berasal dari Bahasa Yunani "Methodos" yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Fungsi metode berarti sebagai alat untuk mencapai tujuan. Penelitian atau riset berasal dari bahasa inggris *"research"* yang artinya adalah proses pengumpulan informasi dengan tujuan meningkatkan, memodifikasi atau mengembangkan sebuah penyelidikan atau kelompok penyelidikan. Pada dasarnya riset atau penelitian adalah setiap proses yang menghasilkan ilmu pengetahuan.

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan bukti dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah (Sugiyono, 2012:2). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga kesimpulannya akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Pengertian metode deskriptif menurut Sugiyono (2012:29) adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2012:29). Dalam penelitian ini metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan kondisi Intensifikasi Pajak dengan menganalisis data jumlah unit pembantu, data Jumlah Wajib Pajak OP dan Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Majalaya tahun 2011-2015.

Sedangkan metode verifikatif menurut Sugiyono (2012:8) adalah penelitian yang dilakukan terhadap populasi atau sampel tertentu, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2012:8). Metode verifikatif digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh Intensifikasi Pajak dan Jumlah Wajib Pajak OP terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

3.2 Operasionalisasi Variabel

Variabel penelitian adalah suatu atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lain (Sugiyono, 2013:3).

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis dan indikator dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini.

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep	Indikator	Skala
Self Assessment System (X1)	Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:101) "*Self Assessment System* menyebabkan Wajib Pajak mendapat beban berat karena semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri. Wajib Pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam SPT, menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak yang terutang".	1. Jumlah Pelaporan SPT Masa PPN (Siti Kurnia Rahayu, 2010:101) dan (Gunadi, 2005)	Rasio
Surat Tagihan Pajak (X2)	Menurut Dedy Setya Utama (2014) Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat yang diterbitkan untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Surat Tagihan Pajak diatur dalam Pasal 14 UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 tahun 2000. DJP dapat menerbitkan STP setelah meneliti data administrasi perpajakan atau setelah melakukan verifikasi, pemeriksaan, pemeriksaan ulang, atau pemeriksaan bukti permulaan dalam rangka penerbitan surat ketetapan pajak. PKP yang melanggar peraturan perpajakan dan telah diterbitkan STP PPN, maka PKP seharusnya segera melunasi kekurangan pembayaran beserta sanksi administrasinya.	1. STP PPN yang diterbitkan atau STP PPN yang dikeluarkan. Dedy Setya Utama (2014), dan Ika Nursanti (2013)	Rasio
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Y)	Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:235) definisi Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut: "Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi umum dalam negeri berupa Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak."	1. Jumlah Realisasi Penerimaan PPN. Siti Kurnia rahayu (2010:235) dan Waluyo (2011:46)	Rasio

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan oleh penulis adalah sumber data sekunder. Data sekunder diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber lain yang sudah tersedia sebelum penulis melakukan penelitian. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan bulanan penerimaan pajak yang berhubungan dengan topik permasalahan yang diteliti, yaitu data tentang Jumlah Realisasi Penerimaan PPN, Jumlah Pelaporan SPT Masa PPN dan data STP PPN yang diterbitkan atau STP PPN yang dikeluarkan pada KPP Pratama Soreang periode 2011-2015.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Observasi

Menurut Sugiyono (2010:144) observasi merupakan teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Dari pengertian tersebut penulis menyimpulkan bahwa observasi yaitu mengumpulkan data dengan jalan dengan mengadakan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mengadakan pengamatan secara langsung ke dalam perusahaan untuk mendapatkan bukti-bukti yang dapat mendukung dan melengkapi hasil penelitian pada KPP Pratama Soreang.

2) Wawancara

Menurut Sugiyono (2013:34) merupakan salah satu tekhnik pengumpulan data yang dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai. Dari pendapat tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa wawancara yaitu teknik pengumpulan data mengadakan tanya jawab secara langsung dengan yang diwawancarai yaitu antara penulis dan pihak yang berhubungan dengan objek yang sedang diteliti. Penulis melakukan wawancara dengan bagian Penerimaan pada KPP Pratama Soreang.

3) Dokumentasi

Pengertian dokumentasi menurut Husein Umar (2013:30) merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen yang terdapat pada perusahaan. Dari penjelasan tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen - dokumen yang tertulis berupa data yang akan diteliti. Dokumen yang diberikan kepada penulis yaitu dokumen dokumen tentang data jumlah SPT yang dilaporkan, Jumlah Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan dan dokumen dokumen tentang penerimaan pajak pertamabahan nilai.

3.4 Populasi dan Penarikan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut sugiyono (2012:61) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Adapun unit analisis dalam penelitian ini adalah 60 Laporan penerimaan pajak pertambahan nilai bulanan, data jumlah pelaporan SPT serta data jumlah STP PPN yang diterbitkan pada KPP Pratama Soreang selama 5 tahun yaitu tahun 2011 sampai dengan 2015.

3.4.2 Penarikan Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2013:62). Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Nonprobability sampling*, dengan jenis *sampling jenuh*.

Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel (Sugiyono,2012:84).

Sampel jenuh/sensus digunakan karena jumlah populasi dalam penelitian ini relatif kecil dan relatif mudah dijangkau, serta diharapkan hasilnya dapat cenderung mendekati nilai sesungguhnya dan diharapkan dapat memperkecil pula terjadinya kesalahan/penyimpangan data. Dengan demikian sampel dalam penelitian ini adalah 60 Laporan penerimaan pajak pertambahan nilai bulanan, data jumlah pelaporan SPT serta data jumlah STP PPN yang diterbitkan pada KPP Pratama Soreang selama 5 tahun yaitu tahun 2011 sampai dengan 2015.

3.4.3 Tempat Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang yang berlokasi di Jalan Raya Cimareme No.205 Ngamprah, Cimareme, Kab. Bandung 40552. Telp (022) 6864413.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2013:224).

3.5.1 Pengumpulan Data Sekunder

Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah laporan penerimaan pajak pertambahan nilai bulanan, data jumlah pelaporan SPT serta data jumlah STP PPN yang diterbitkan. Dimana data tersebut diperoleh langsung dari KPP Pratama Soreang.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini Menurut Gujarati (2006:56), untuk memperoleh hasil yang lebih akurat dan model regresi tidak bias atau model regresi *Best Linier Unbiased Estimator* (BLUE) pada analisis regresi linier berganda, maka perlu dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu.

Berikut penjelasan menurut Husein Umar (2008:77-84) mengenai beberapa uji asumsi klasik yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum menggunakan analisis regresi linier berganda sebagai alat untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel yang diteliti, terdiri atas :

1. Uji Normalitas

Uji normalitas berguna untuk mengetahui apakah variabel independen atau dependen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal, atau tidak. Jika data berdistribusi normal maka model regresi dapat digunakan.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas berguna untuk mengetahui apakah pada model regresi yang diajukan telah ditemukan korelasi kuat antar variabel independen. Jika terjadi korelasi kuat, maka terdapat masalah multikolinearitas yang harus diatasi. Model regresi yang baik yaitu tidak terdapatnya multikolinearitas atau tidak terjadi korelasi antar variabel independen.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residula suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, disebut homoskedastisitas, sedangkan jika berbeda disebut dengan heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi berguna untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linear terdapat hubungan yang kuat baik positif maupun negatif antar data yang ada pada variabel-variabel penelitian. Jika tejadi korelasi, maka hal tersebut dinamakan adanya permasalahan autokorelasi.

3.5.3 Metode Analisis Data

Peneliti melakukan analisa terhadap data yang telah diuraikan dengan menggunakan metode :

1. Analisis Regresi Linier Berganda.

Analisis regresi linier berganda adalah analisis untuk mengukur besarnya pengaruh antara dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen dan memprediksi variabel dependen dengan menggunakan variabel independen (Duwi Priyatno, 2012:217). Analisis regresi linier berganda yang peneliti gunakan memiliki tujuan untuk menerangkan seberapa besar laba bersih dipengaruhi oleh biaya operasional dan volume penjualan.

2. Analisis Korelasi

Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linier antara dua variabel. Korelasi juga tidak menunjukkan hubungan fungsional. Dengan kata lain, analisis korelasi tidak membedakan antara variabel dependen dengan variabel independen. Dalam analisis regresi, analisis korelasi yang digunakan juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen selain mengukur kekuatan asosiasi (hubungan).

3. Analisis Koefisiensi Determinasi

Analisis Koefisiensi Determinasi (KD) digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) yang dinyatakan dalam persentase.

3.6 Metode Pengujian Data

3.6.1 Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini yang akan diuji adalah Pengaruh *Self Assessment System* dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Pratama Soreang. Rancangan pengujian hipotesis ini dinilai dengan penetapan hipotesis nol dan hipotesis alternatif, penelitian uji statistik dan perhitungan nilai uji statistik, perhitungan hipotesis, penetapan tingkat signifikan dan penarikan kesimpulan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini, akan dijelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dilanjutkan dengan perhitungan statistik dan pengujian hipotesis. Seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jumlah Pelaporan SPT (X_1), Jumlah Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan (X_2) serta Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y) di KPP Pratama Soreang.

Metode analisis yang digunakan dalam pengolahan data pada penelitian ini adalah analisis deskirptif dan analisis regresi berganda sebagai alat bantu dalam pengambilan kesimpulan.

4.1.1 Hasil Analisis Deskriptif

Analisis ini dilakukan untuk memberikan gambaran atau deskripsi mengenai suatu data agar data yang tersaji menjadi mudah dipahami dan informatif bagi orang yang membacanya. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Soreang selama 5 tahun setiap bulannya dari tahun 2011 sampai 2015 menggunakan Laporan penerimaan pajak bulanan, Jumlah Pelaporan SPT Masa PPN, dan STP PPN yang diterbitkan.

4.1.1.1 Analisis Deskriptif *Self Assessment System*

Adapun penjelasan data jumlah pelaporan SPT Masa PPN pada KPP Pratama Soreang sebagai berikut :

1) Tahun 2011, setiap bulannya rata-rata jumlah pelaporan SPT Masa PPN yang terdaftar di KPP Soreang adalah sebanyak 3.733 orang wajib pajak. Jumlah terendah pelaporan SPT Masa PPN ada pada bulan Januari yaitu sebanyak 2.239 orang wajib pajak, dan jumlah tertinggi ada pada bulan November yaitu sebanyak 5.375 orang wajib pajak yang melaporkan SPT Masa PPN-nya.
2) Tahun 2012, setiap bulannya rata-rata jumlah pelaporan SPT Masa PPN yang terdaftar di KPP Soreang adalah sebanyak 3.640 orang wajib pajak. Jumlah terendah pelaporan SPT Masa PPN ada pada bulan Februari yaitu sebanyak 2.184 orang wajib pajak, dan jumlah tertinggi ada pada bulan November yaitu sebanyak 5.678 orang wajib pajak yang melaporkan SPT Masa PPN-nya.
3) Tahun 2013, setiap bulannya rata-rata jumlah pelaporan SPT Masa PPN yang terdaftar di KPP Soreang adalah sebanyak 3.681 orang wajib pajak. Jumlah terendah pelaporan SPT Masa PPN ada pada bulan Maret yaitu sebanyak 2.208 orang wajib pajak, dan jumlah tertinggi ada pada bulan Desember yaitu sebanyak 5.742 orang wajib pajak yang melaporkan SPT Masa PPN-nya.
4) Tahun 2014, setiap bulannya rata-rata jumlah pelaporan SPT Masa PPN yang terdafta di KPP Soreang adalah sebanyak 4.241 orang wajib pajak. Jumlah terendah pelaporan SPT Masa PPN ada pada bulan Februari yaitu sebanyak 2.504 orang wajib pajak, dan jumlah tertinggi ada pada bulan Desember yaitu sebanyak 6.615 orang wajib pajak yang melaporkan SPT Masa PPN-nya.
5) Tahun 2015, setiap bulannya rata-rata jumlah pelaporan SPT Masa PPN yang terdafta di KPP Soreang adalah sebanyak 4.669 orang wajib pajak. Jumlah terendah pelaporan SPT Masa PPN ada pada bulan Mei yaitu sebanyak 1.680 orang wajib pajak, dan jumlah tertinggi ada pada bulan September yaitu sebanyak 7.284 orang wajib pajak yang melaporkan SPT Masa PPN-nya.

4.1.1.2 Analisis Deskriptif Surat Tagihan Pajak

Adapun penjelasan data jumlah Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan pada KPP Pratama Soreang sebagai berikut :

1) Pada tahun 2011, jumlah rata-rata penerbitan surat adalah sebanyak 205 surat, dengan jumlah terendah ada pada bulan Januari sebanyak 120 surat, dan terbanyak ada pada bulan Desember, yaitu sebanyak 319 surat. Jumlah STP yang diterbitkan pada tahun ini adalah sebanyak 2.456 surat.
2) Pada tahun 2012, jumlah rata-rata penerbitan surat adalah sebanyak 162 surat, dengan jumlah terendah ada pada bulan Februari sebanyak 97 surat, dan terbanyak ada pada bulan Desember, yaitu sebanyak 252 surat. Jumlah STP yang diterbitkan pada tahun ini adalah sebanyak 1.940 surat.
3) Pada tahun 2013, jumlah rata-rata penerbitan surat adalah sebanyak 145 surat, dengan jumlah terendah ada pada bulan Januari sebanyak 86 surat, dan terbanyak ada pada bulan Desember, yaitu sebanyak 225 surat. Jumlah STP yang diterbitkan pada tahun ini adalah sebanyak 1.737 surat. Jumlah surat yang diterbitkan tahun ini merupakan yang terkecil selama periode 2011-2015.
4) Pada tahun 2014, jumlah rata-rata penerbitan surat adalah sebanyak 181 surat, dengan jumlah terendah ada pada bulan Januari sebanyak 108 surat, dan terbanyak ada pada bulan Desember, yaitu sebanyak 282 surat. Jumlah STP yang diterbitkan pada tahun ini adalah sebanyak 2.176 surat.
5) Pada tahun 2015, jumlah rata-rata penerbitan surat adalah sebanyak 345 surat, dengan jumlah terendah ada pada bulan Februari sebanyak 207 surat, dan terbanyak ada pada bulan Desember, yaitu sebanyak 538 surat. Jumlah STP yang diterbitkan pada tahun ini adalah sebanyak 4.143 surat.

4.1.1.3 Analisis Deskriptif Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Dari data yang telah diperoleh diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Pada 2011, rata-rata penerimaan PPN pebulannya adalah sebesar Rp. 13,677,192,261. Penerimaan terendah ada pada bulan Februari sebesar Rp. 8,016,030,308.90 dan tertinggi pada bulan Desember Rp. 21,362,458,933.14. Pada tahun ini Penerimaan PPN terealisasi sebesar 110%, jumlah realisasi Rp. 164,326,607,178 dengan target Rp. 149,487,010,219.
2) Pada 2012, rata-rata penerimaan PPN pebulannya adalah sebesar Rp. 16,961,226,679. Penerimaan terendah ada pada bulan Januari sebesar Rp. 10,176,736,007.30 dan tertinggi pada bulan Desember Rp. 26,459,513,618.98. Pada tahun ini Penerimaan PPN terealisasi sebesar 129%, jumlah realisasi Rp. 203,534,720,146 dengan target Rp. 157,532,009,244.

3) Pada 2013, rata-rata penerimaan PPN pebulannya adalah sebesar Rp. 15,083,581,591. Penerimaan terendah ada pada bulan Januuari sebesar 9,050,148,954.35 dan tertinggi pada bulan Desember Rp. 23,530,387,281.31. Pada tahun ini Penerimaan PPN terealisasi sebesar 87%, jumlah realisasi Rp. 181,002,979,087 dengan target Rp. 208,809,614,360.
4) Pada 2014, rata-rata penerimaan PPN pebulannya adalah sebesar Rp. 31,264,946,525. Penerimaan terendah ada pada bulan Januari sebesar 18,758,967,915.25 dan tertinggi pada bulan Desember Rp. 48,773,316,579.65. Pada tahun ini Penerimaan PPN terealisasi sebesar 146%, jumlah realisasi Rp. 375,179,358,305 dengan target Rp. 256,100,728,661.
5) Pada 2015, rata-rata penerimaan PPN pebulannya adalah sebesar Rp. 38,161,326,316. Penerimaan terendah ada pada bulan Januari sebesar 22,896,795,789.70 dan tertinggi pada bulan Desember Rp. 59,531,669,053.22. Pada tahun ini Penerimaan PPN terealisasi sebesar 77%, jumlah realisasi Rp. 457,935,915,794 dengan target Rp. 597,224,882,339.

4.1.2 Hasil Analisis Verifikatif

Setelah diuraikan gambaran data masing-masing variabel penelitian, selanjutnya diuji pengaruh *Self Assessment System* (X_1) dan Surat Tagihan Pajak (X_2) terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y) secara parsial. Pengujian akan dilakukan melalui tahapan seperti pengujian asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, koefisien korelasi parsial, koefisien determinasi serta pengujian hipotesis. Pengujian tersebut dilakukan dengan bantuan perangkat lunak IBM SPSS Statistics v.24.

Persamaan regresi linier yang diperoleh melalui metode penaksiran OLS *(Ordinary Least Square)* dapat dikatakan baik untuk menggambarkan hubungan fungsional variabel bebas terhadap variabel terikat jika persamaan tersebut memenuhi asumsi-asumsi regresi klasik. Asumsi klasik yang dipakai ada penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, uji Autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.

4.1.2.1 Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Pada penelitian ini uji normalitas menggunakan Uji *Kolmogorov- Smirnov*. Hasil perhitungan uji normalitas residual dari persamaan taksiran yang diperoleh dari hasil penghitungan uji Normalitas untuk data nilai residual dari model signifikansi (p) adalah 0,134 berada di atas 0,05. Hasil pengujian normalitas model regresi menunjukkan bahwa nilai residual dari model berdistribusi normal.

2) Uji Heteteroskedastisitas

Pengujian Heteroskedastisitas dilakukan dengan metode uji *Glejser*, uji *glejser* dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Dari output di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi kedua variabel independen lebih dari 0.05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

3) Uji Multikolinieritas

Pengujian Multikolinieritas yang dilakukan pada pada penelitian ini adalah dengan melihat nilai *Tollerance* dan VIF. Berkasarkan output di atas dapat diketahui nilai *Tollerance* untuk variabel Intensifikasi Pajak dan Jumlah Wajib Pajak adalah 0.508 dan nilai VIF untuk kedua variabel bebas adalah 1.967, dasar pengambilan keputusan pada pengujian multikolinieritas ini adalah dengan melihat nilai *Tollerance* dan VIF, jika nilai *Tollerance* lebih dari 0.10 dan jika nilai VIF lebih kecil dari 10.00 maka tidak terjadi multikolinieritas. Kesimpulannya dilihat dari output yang didapat bahwa nilai kedual variabel untuk *Tollerance* 0.508>0.10 dan VIF 1.967<10.00, maka kedua variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini memenuhi syarat regresi, yaitu tidak terjadi multikolinieritas.

4) Uji Autokorelasi

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan penggangu pada periode t dengan kesalahan dapa periode t1 (Sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi atau tidak terjadi autokorelasi. Pengujian yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan mengunakan uji Durbin-Watson (DW ¬Test). Dari output di atas didapat nilai DW 1.655, nilai ini akan dibandingkan dengan nilai table signifikansi 5%, jumlah sampel 60 (n) dan jumlah variael independen 2 (K=2) = 2.60 (Cari pada table Dubin-Watson) maka diperoleh nilai dU 1.652 dan nilai dL 1.514. berdasarkan gambaran arah pengambilan kesimpulan berikut nilai DW 1.655 berada pada wilayah tidak ada Autokorelasi. Maka dapat disimpulkan data tidak terjadi autokorelasi.

4.1.2.2 Persamaan Regresi Linier Berganda

Dari tabel output 4.10 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -2.781.613.161 + 1.810.979\, X_1 + 89.544.599 X_2$$

Dari hasil persamaan regresi linier berganda tersebut masing-masing variabel dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

a) Konstanta senilai -2.781.613.161 menunjukan bahwa ketika *Self Assessment System* dan Surat Tagihan Pajak bernilai nol (0) dan tidak ada perubahan, maka Penerimaan Pajak akan -2.781.613.161.
b) Nilai variable *Self Assessment System* (X_1) memiliki nilai koefisien regresi positif sebesar 1.810.979 Artinya ketika *Self Assesment System* meningkat 1 rupiah, sementara Partisipasi Penyusunan konstan atau bernilai nol (0), maka Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai akan meningkat sebesar Rp. 1.810.979.
c) Nilai variable Surat Tagihan Pajak memiliki nilai koefisien regresi Positif sebesar 89.544.599. Artinya setiap ada peningkatan Jumlah Surat Tagihan Pajak sebesar 1 surat, sementara *Self Assessment System* konstan, maka Penerimaan Pajak Pertambahan Nilaiakan meningkat sebesar Rp. 89.544.599.

4.1.2.3 Analisis Korelasi Parsial

Berdasarkan table 4.11 di atas terlihat bahwa nilai koefisien korelasi parsial yang diperoleh antara *Self Assessment System* dengan PPN adalah sebesar 0.690. nilai korelasi bertanda positif menunjukan hubungan kedua variable terjadi searah, dimana semakin baik SPT yang dilaporkan WP akan diikuti oleh semakin baiknya Penerimaan PPN. Berdasarkan interpretasi koefisien korelasi, pada tabel 3.6 nilai sebesar 0.690 termasuk kedalam kategori hubungan yang Kuat, karena berada pada interval 0.60-0.79.

Berdasarkan table 4.11 di atas terlihat bahwa nilai koefisien korelasi parsial yang diperoleh antara STP dengan Penerimaan PPN adalah sebesar 0.842. nilai korelasi bertanda positif menunjukan hubungan kedua variable searah, dimana semakin Banyak jumlah STP akan diikuti oleh semakin baiknya Penerimaan PPN. Berdasarkan interpretasi koefisien korelasi pada tabel 3.6 nilai sebesar 0.842 termasuk kedalam kategori hubungan yang Sangat Kuat, karena berada pada interval 0.81-1.00.

4.1.2.4 Koefisien Determinasi

Berdasarkan output di atas dilakukan perhitungan sebagai berikut:

1) Pegaruh *Self Assessment System* terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai =0.196*0.690=0.1352 atau 13.52 %.
2) Pengaruh STP terhadap Penerimaan Pajak PPN =0.705*0.842=0.5936 atau 59.36%
   Dari perhitungan di atas, terlihat dari kedua variable yang digunakan, *Self Assessment System* (X_1) memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Pajak (Y) sebesar 13.52%, lalu STP (X_2) sebesar 59.52% dan sisanya dipengaruhi oleh pengaruh lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

4.1.2.5 Pengujian Hipotesis

1) Pengujian hipotesis parsial variabel *Self Assessment System* terhadap Penerimaan PPN

Dari tabel 4.13 di atas dapat diketahui nilai t_{hitung} variabel *Self Assessment System* adalah sebesar 2.031. Nilai 2.031 kemudian dibandingkan dengan nilai t_{tabel} 2.002, dapat disimpulkan nilai 2.031 lebih besar dari 2.002 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya scara parsial variabel *Self Assessment System* memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel Penerimaan PPN.

2) Pengujian hipotesis parsial variabel STP terhadap PPN

Dari tabel 4.13 di atas dapat diketahui nilai t_{hitung} variabel Jumlah STP terhadap Penerimaan PPN adalah sebesar 7.288. nilai 7.288 ini kemudian dibandingkan dengan nilai t_{tabel} 2.002, dapat disimpulkan nilai 7.288 lebih besar dari 2.002 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya secara parsial Jumlah STP memberikan pengaruh signifikan terhadap variabel Penerimaan PPN.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Self Assessment System terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai memberikan pengaruh, dengan tingkat keeratan korelasi yang Kuat. t_{hitung} diperoleh lebih besar dari pada t_{tabel}, sehingga dapat disimpulkan bahawa pengujian hipotesis memberikan hasil menolak Ho dan menerima Ha yang berarti *Self Assessment System* memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Soreang. *Self Assessment System* memberikan pengaruh positif terhadap Penerimaan PPN, maka dapat disimpulkan semakin baik SPT yang dilaporkan oleh Wajib Pajak maka akan membuat Penerimaan PPN semakin baik pula.

Berdasarkan hasil penelitian menjawab fenomena yang telah dikemukakan, bahwa Wajib Pajak tidak melaporkan SPT Masa PPN dan tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut, dimana hal itu membuat realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Maka dari itu upaya untuk mengatasi masalah ini pihak dari KPP Pratama Soreang terus sering-sering memberikan arahan dan pengetahuan kepada Wajib Pajak tentang pentingnya peranan pajak itu sendiri di negara ini. Sehingga Wajib Pajak pun sadar dan akan melaporkan SPT, dan membayar pajaknya.

Hasil penelitian yang menunjukan pengaruh antara *Self Assessment System* dengan Penerimaan PPN dan dengan arah hubungan yang positif ini didukung oleh teori yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu menurut Widi Widodo (2008:27), menjelaskan Jumlah kewajiban pajak langsung atas Wajib Pajak adalah dengan ditetapkan dalam keputusan yang diberikan oleh Administrasi Pajak sesuai tempat tinggal Wajib Pajak. Pengaruhnya Wajib Pajak harus melaporkan SPT kepada Administrasi Pajak setelah akhir periode Pajak, sesuai dengan tahun kalender. *Self Assessment* berlaku dalam sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kewajiban PPN ditentukan untuk periode akuntansi tertentu yang disajikan dan menyatakannya dalam pelaporan pajak mereka.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ida Ayu Trisnayanti I Ketut Jati (2015), menyatakan *bahwa Self Assessment System* berpengaruh positif pada penerimaan PPN. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2011), menyatakan SPT Masa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan PPN.

4.2.2 Pengaruh Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan PPN memberikan pengaruh, dengan tingkat keeratan korelasi yang Sangat Kuat. t_{hitung} diperoleh lebih besar dari pada t_{tabel}, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian hipotesis memberikan hasil menolak Ho dan menerima Ha yang berarti Surat Tagihan Pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Soreang. Jumlah Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan memberikan pengaruh positif terhadap Penerimaan PPN, maka dapat disimpulkan semakin banyak Jumlah STP yang diterbitkan oleh KPP Soreang maka akan membuat Penerimaan PPN semakin baik pula.

Berdasarkan hasil penelitian menjawab fenomena yang telah dikemukakan, bahwa penunggakan pajak yang cukup besar yang dilakukan oleh wajib pajak, dimana hal itu membuat realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Maka dari itu upaya untuk mengatasi masalah ini adalah terus meningkatkan dalam melakukan penagihan yaitu melalui Surat Tagihan Pajak berupa Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Sehingga Wajib Pajak akan membayarkan tunggakan pajaknya.

Hasil penelitian yang menunjukan arah hubungan yang positif ini juga di dukung oleh teori pada pembahsan sebelumnya yaitu menurut Resmi (2009:59), menjelaskan Surat Tagihan Pajak adalah surat yang diterbitkan untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Surat tagihan pajak dikeluarkan apabila hasil analisis fiskus, wajib pajak tidak atau kurang bayar, harus membayar denda, atau berkaitan dengan kewajiban sebagai PKP dalam hubungannya dengan pembayaran.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan Dedy Setya Utama Pandiangan (2015), menyatatakan penerbitan Surat Tagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan identifikasi masalah, kerangka pemikiran dan hasil penelitian mengenai Pengaruh *Self Assessment System* dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang, maka dapat di rumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1) *Self Assessment System* memberikan pengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Soreang. *Self Assessment System* memberikan pengaruh positif terhadap Penerimaan PPN, maka dapat disimpulkan semakin baik SPT yang dilaporkan oleh Wajib Pajak maka akan membuat Penerimaan PPN semakin baik pula. Namun jika Wajib Pajak tidak melaporkan SPT Masa PPN dan tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut, maka Penerimaan PPN tidak akan terealisasi dari target yang telah ditetapkan.
2) Surat Tagihan Pajak memberikan pengaruh terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di KPP Pratama Soreang. Jumlah Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan memberikan pengaruh positif terhadap Penerimaan PPN, maka dapat disimpulkan semakin banyak Jumlah STP yang diterbitkan oleh KPP Pratama Soreang maka akan membuat Penerimaan PPN semakin baik pula. Namun jika ada penunggakan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, maka Penerimaan PPN tidak akan terealisasi dari target yang telah ditetapkan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti memberikan saran yang dapat dijadikan masukan bagi KPP Pratama Soreang sebagai berikut:

5.2.1 Saran Praktis

1.) Bagi KPP Pratama Soreang diharapkan terus sering-sering memberikan arahan dan pengetahuan kepada Wajib Pajak tentang pentingnya peranan pajak itu sendiri di negara ini, sehingga Wajib Pajak pun sadar akan pentingnya membayar pajak.
2.) Bagi KPP Pratama Soreang diharapkan terus meningkatkan dalam melakukan penagihan yaitu melalui Surat Tagihan Pajak berupa Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Sehingga Wajib Pajak akan membayarkan pajaknya.

5.2.2 Saran Akademis

1.) Pengembangan Ilmu, diharapkan hasil penelitian ini sebagai pembuktian kembali dari teori-teori dan hasil penelitian terdahulu dan untuk pengembangan ilmu terkait dengan pengaruh *Self Assessment System* dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
2.) Bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan topik yang sama dengan menambahkan indikator yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode penelitian yang sama yaitu Regresi Berganda, tetapi dengan unit analisis, populasi, dan sampel yang digunakan berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku :

Andi Prastowo. 2012. *Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif.* Yogyakarta: Diva Press.

Gujarati, D.N. 2004 *Essentials of Econometrics, Third Edition, McGraw-Hill International Edition*, (terjemahan: Mulyadi, J.A., dkk, 2007, Dasar-dasar Ekonometrika Jilid I dan II) Erlangga: Jakarta.

Imam Ghozali. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi 2011* .Yogyakarta: Penerbit Andi.

Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia. Konsep dan Aspek Fornal.* Yogyakarta:Graha ilmu

Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati. 2010. *Perpajakan Indonesia. Teori dan Teknis Perhitungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Siti Resmi. 2014. *Perpajakan. Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta

Tata Sutabri. 2012. *Analisis Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi

Umi Narimawati. 2010. *Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Penerbit Genesis.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia.* Jakarta: Salemba Empat

Widi Widodo dan Dedi Djefris. 2008. *Tax Payer's Right. Apa Yang Perlu Kita Ketahui Tentang Hak-hak Wajib Pajak?*. Bandung: Alfabeta

Yakub. 2012. *Pengantar Sistem Informasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Referensi Jurnal :

Ahmad Prayudi. 2010. Pengaruh Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. ISSN: 1907-415

Dedi Setya Utama Pandiangan 2014. Pengaruh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Tagihan Pajak, Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). ISSN 1907-3771 e-jurnal akuntansi universitas atmajaya (2014)

Fika Agusti, Asri 2008. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak pada KPP Pratama. *Jurnal pada Simposium Akuntansi Nasional 12.*

Ida Ayu Ivon Trisnayant dan I Ketut Jati. 2015. Pengaruh *Self Assessment System,* Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (ppn). ISSN: 2302-8556 e-jurnal akuntansi universitas udayana 13.1 (2015): 292-310)

Ika Nursanti. 2013. Pengaruh *Self Assessment System* dan Surat Tagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 1 Nomor 1, Januari 2013)

Saepudin. 2008. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Sumatera Utara. *Tesis* Pascasarjana Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

Tresno, Indra, Wulan. 2012. Pengaruh Penambahan Wajib Pajak Badan, Penyampaian SPT Masa PPh Badan, dan Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP Pratama Jakarta Mataram. Universitas Negeri Jakarta, Jakarta: *Disertasi yang tidak dipublikasikan*

Yusuf, Mohammad Ismail. 2011. Analisis Determinan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Di Sumatera Utara. *Tesis* Sekolah Pascasarjana Unversitas Sumatera Utara

Referensi Internet:

http://www.pajak.go.id

LAMPIRAN

Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Self Assessment System	60	1680.00	7284.00	3992.9333	1365.93730
Surat Tagihan Pajak	60	86.00	538.00	207.5333	99.11292
Penerimaan PPN	60	8216330359	5.95E+10	2.3033E+10	1.25954E+10
Valid N (listwise)	60				

Normalitas Kolmogorov Smirnov

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000015
	Std. Deviation	6555306895.139909
Most Extreme Differences	Absolute	.130
	Positive	.130
	Negative	-.091
Test Statistic		.130
Asymp. Sig. (2-tailed)		.134[c]

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Multikolinieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Self Assessment System	.508	1.967
	Surat Tagihan Pajak	.508	1.967

Heteroskedastisitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	1169485562	1667743340		.701	.486
	Self Assessment System	1231019.117	554622.723	.391	2.220	.304
	Surat Tagihan Pajak	-5658973.719	7643603.198	-.131	-.740	.462

a. Dependent Variable: RES2

Auto Korelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.854[a]	.729	.720	6669320780	1.655

a. Predictors: (Constant), Surat Tagihan Pajak, Self Assessment System

Regresi

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-2781613161	2680752676		-1.038	.304
	Self Assessment System	1810978.644	891507.892	.196	2.031	.047
	Surat Tagihan Pajak	89544599.31	12286428.76	.705	7.288	.000

Model		Standardized Coefficients	Correlations		
		Beta	Zero-order	Partial	Part
1	Self Assessment System	.196	.690	.260	.140
	Surat Tagihan Pajak	.705	.842	.695	.502

Korelasi

Correlations

		Self Assessment System	Surat Tagihan Pajak	Penerimaan PPN
Self Assessment System	Pearson Correlation	1	.701	.690
	Sig. (2-tailed)		.000	.000
	N	60	60	60
Surat Tagihan Pajak	Pearson Correlation	.701	1	.842
	Sig. (2-tailed)	.000		.000
	N	60	60	60
Penerimaan PPN	Pearson Correlation	.690	.842	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	N	60	60	60